BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pariwisata

Teori pariwisata menurut **Salah Wahab**, "Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru,yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam halkesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sector produksi lain di dalam negara penerima wisatawan."(Wahab, 2003: 5).

Pariwisata merupakan faktor yang penting dalam pengembangan ekonomi karena mendorong perkembangan sektor ekonomi nasional, diantaranya menggugah industri baru berkaitan dengan jasa wisata, misal: usaha transportasi,akomodasi (hotel, motel, pondok wisata), memperluas pasar barang-barang lokal pariwisata, memperluas lapangan kerja baru (hotel atau tempat penginapan lainnya, usaha perjalanan, kantor-kantor pemerintah yang mengurus pariwisata dan penerjemah, industri kerajinan tangan dan cenderamata, serta tempat-tempat penjualan lainnya), serta membantu pembangunan daerah-daerah terpencil jika daerah itu memiliki daya tarik pariwisata. (Wahab, 2003: 9).

Dapat diartikan bahwa pariwisata dapat menunjang perekonomian obyek wisata yang dituju oleh para wisatawan. Dalam penelitian kali ini adalah pariwisata dapat mengembangkan potensi yang ada pada desa-desa wisata, misal:potensi kerajinan, pertanian, budaya, agro dan pemandangan alam yang terdapat di masing-masing desa wisata. Sehingga dengan berkunjungnya wisatawan kedesa-desa wisata, hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Selain mengembangkan potensi desa wisata, pariwisata dapat menghidupkan industri jasa wisata, dalam hal ini transportasi yang ada di desa wisata, penginapan, serta kerajinan tangan yang dikembangkan di suatu desa wisata. Pariwisata juga membantu pembangunan daerah desa wisata tersebut agar semakin berkembang dan dapat meningkatkan potensi wisatanya. Bukan hanya itu saja, pariwisata juga dapat menjadikan lahan lapangan kerja baru, misal: kantor pariwisata, penerjemah (guide), industri kerajinan, tempat penjualan cenderamata, dan lain sebagainya.

Wisatawan (tourist) adalah pengunjung yang menetap sekurang - kurangnya 24 jam di suatu negara dan maksud mereka berkunjung dapat didasarkan atas:

a. Waktu luang (berekreasi, cuti, untuk kesehatan, studi agama, dan olahraga).
b. Bisnis, keluarga, misi, rapat dinas (Wahab, 2003: 40).

Konsep waktu luang disini diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan jelas,yakni untuk mencari kepuasan atau melakukan relaksasi melalui perjalanan. (Susanto, 1995: 134), Sehingga waktu luang yang dihabiskan wisatawan bukan berarti tanpa tujuan yang jelas, tetapi wisata dimaksudkan untuk berhenti sejenak dari aktifitas sehari-hari dan mencari kesenangan melalui kegiatan berwisata.Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud wisatawan adalah pengunjung yang menginap di homestay-homestay yang telah disediakan di desa wisata. Sedangkan wisatawan nusantara adalah wisatawan dalam negeri. Wisatawan nusantara sama artinya dengan wisatawan domestik.

2.2. Pengertian Pariwisata

Ada beberapa pengertian pariwisata dan berbagai hal yang berkaitan dengan pariwisata yang akan dibahas, antara lain :

1. Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri (sujali,1989).
2. Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki obyek itu sendiri yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dan dukungan bagi pengembangan (Sujali, 1989).
3. Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung pengembangan suatu obyek wisata terdiri dari aksesibilitas, fasilitas penunjang, dan fasilitas pelengkap. (Sujali, 1989).
4. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. (Oka. A. Yoeti,1982).
5. Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan hal yang baru.

6. Obyek wisata adalah suatu tempat dimana orang atau rombongan melakukan perjalanan dengan maksud menyinggahi obyek karena sangat menarik bagi mereka. Misalnya obyek wisata alam, obyek wisata sejarah dan sebagainya.
7. Sektor pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata, termasuk pengusahaan obyek serta usaha-usaha yang terkait dibidang pariwisata.
8. Strategi adalah rencana-rencana atau kebijakan yang dibuat dengan cermat untuk memajukan atau mengembangkan sektor pariwisata sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Kontribusi sektor pariwisata adalah sumbangan yang diberikan oleh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3. Jenis-jenis Pariwisata

Pada pengembangan pariwisata terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau sebagai potensi yang perlu dikembangkan pada tujuan daerah wisata. Potensi ini berpengaruh dengan motivasi wisatawan yang akan menarik untuk dating berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut. Adapun berbagai jenis pariwisata berdasarkan motif perjalanan wisata (Spilane, 1985 dan Yoeti, 1996), yaitu :

1. Wisata budaya, motivasinya untuk mengetahui dan mempelajari kebudayaan tertentu.
2. Wisata perjalanan, umumnya berpergian menikmati keindahan alam.
3. Wisata kesehatan dan rekreasi, motivasinya mengunjungi lokasi untuk bersantai dan menikmati serta menyegarkan wisatawan akan kondisi jasmani dan rohani.
4. Wisata olahraga, motivasinya untuk berolahraga seperti mendaki gunung, berburu, atau ikut serta dalam kegiatan olahraga seperti Olympiade.
5. Wisata komersil untuk urusan dagang, motivasinya mengunjungi pameran-pameran atau pecan raya atau festival yang bersifat komersial menyangkut kebutuhan atau profesi dari wisatawan tersebut.
6. Wisata maritim, motivasinya menyaksikan keindahan laut, pantai, sungai dan danau.

2.4. Konsep Pengembangan Parwisata

2.4.1. Transportasi

Transportasi dalam bidang kepariwisataan sangat erat hubungannya dengan aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimaksud yaitu frekuensi penggunaan kendaraan yang dimiliki dapat mempersingkat waktu dan tenaga serta lebih meringankan biaya perjalanan. Menurut Oka.A.Yoeti (1997) bahwa aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis, serta tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan tersebut. Kondisi transportasi seperti jalan, keberadaan moda angkutan, terminal, stasiun pengisian bahan bakar dan lainnya. Adapun teori menurut James.J.Spilane (1994), ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang berkaitan dengan transportasi yang dapat menjadi semacam pedoman termasuk berikut ini.

1. Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan local ditempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari daerah asal.
2. Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas.
3. Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua Bandar udara.
4. Sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi pelayanan pengangkutan lain yang dapat dihubungi diterminal termasuk jadwal dan tarif.
5. Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatanga harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon.
6. Informasi lengkap tentang lokasi, tariff, jadwal, dan rute serta pelayanan pengangkutan local.
7. Peta kota harus tersedia bagi penumpang.

2.4.2. Atraksi/obyek wisata

Menurut Oka.A. Yoeti (1997) ada tiga syarat dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam berbagai pasar, yaitu:

a. Something to see

Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain.

b. Something todo

Artinya di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu.

c. Something to buy

Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (shopping), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibwa pulang ke tempat asal wisatawan.

Ketiga syarat tersebut sejalan dengan pola tujuan pemasaran pariwisata, yaitu dengan promosi yang dilakukan sebenarnya hendak mencapai sasaran agar lebih banyak wisatawan dating pada suatu daerah, lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang mereka kunjungi. Menurut Oka.A.Yoeti (2002) atraksi wisata adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti :

a. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang dalam istilahnya *Natural Amenities.* Termasuk kelompok ini adalah:

- Iklim contohnya curah hujan, sinar matahari, panas dan salju.
- Bentuk tanah dan pemandangan contohnya pegunungan, perbukitan, panta, air terjun, dan gunung berapi.
- Hutan belukar
- Flora dan fauna yaitu tersedia cagar alam dan daerah perburuan.
- Pusat pusat kesehatan misalnya: sumber air mineral, sumber air panas, dan mandi lumpur. Dimana tempat tersebut diharapkan dapat menyembuh berbagai penyakit.

b. Hasil ciptaan manusia, bentuk ini dapat dibagi dalam empat produk wisata yang berkaitan dengan tiga unsur penting yaitu sejarah, budaya, dan agama.

- Monument bersejarah dan sisa peradaban masa lampau seperti artifak dan situs

- Museum, gedung kesenian, perpustakan, kesenian rakyat dan kerajinan tangan
- Acara tradisional, pameran, festival, upacara adat, upacara keagamaan.
- Rumah-rumah ibadah, seperti masjid, gereja, candi, kuil.

Menurut James.J.Spilane (1994), atraksi meruapakan pusat industri pariwisata. Menurut pengertiannya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah:

- Keindahan alam
- Iklim dan cuaca
- Kebudayaan
- Sejarah
- Ethnicity atau sifat kesukuan
- Aksesibilitas atau kemampuan atau kemudahan berjalan atau ketempat tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa ada tiga jenis atraksi wisata, yaitu benda yang sudah tersedia di alam, hasil ciptaan manusia dan tata cara hidup dalam masyarakat.

2.4.3. Fasilitas pelayanan

Menurut Oka.A.Yoeti (1997) fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk *tour and travel operation* (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya: restorasn dan berbagai jenis tempat makan lainnya, took-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, bank, *moneychanger* , dan fasilitas pelayanan keungan lainnya, informasi wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umur (kantor polisi dan pemadam kebakaran), pos penjagaan, rambu-rambu peringatan dan fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar.

2.4.4. Informasi dan promosi

Menurut Oka.A.Yoeti (1997) hal pendukung adalah publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana *leaflets*/brosur disebarkan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengmbil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya, karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya:

a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan kedaerahannya dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
b. Melakukan koordinasi di antara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawaban yang ada dan bersetujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.
c. Mengusahakan memasyarakatan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.
d. Mengadakan program riset yang bersetujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu yang akan datang.

Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan strategi pengembangan daya tarik wisata dalam penelitian ini adalah usaha-usaha terencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam usaha meningkatkan dan memperbaiki daya tarik wisata sehingga keberadaan daya tarik wisata itu lebih diminati oleh wisatawan.

2.5 Partisipasi Masyarakat

A. Pengertian dan Prinsip partisipasi Masyarakat

Menurut Ach. Wazir Ws (1999:29) partisipasi bila diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadara ke dalam interaksi social dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa bertasipasi bila menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarkat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah ‘‘pemekaan’’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar suapaya memperoleh inforamsi mengenai konteks local, dan dampak-dampak social;
6. Partispasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehiduapan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan defenisi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partispsi adalah keterlibatan aktif seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk kontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai tahap evaluasi.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertical dan partisipasi horizontal.

- Partisipasi vertical adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
- Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi social, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta, benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi social, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalm setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara

memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

C. Prinsip-prinsip Partisipasi

Sebagaiman tertuang dalam panduan pelaksanaan yang disusun oleh Department For International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- Cakupan : Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*): pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- Transparansi : Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership)* : Berbagi pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*) : Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- Pemberdayaan (*Empowerment*) : keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

- Kejasama : Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang telibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa fakto yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat factor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya factor usia, terbatasnya harta, benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Menurut Ross (1967) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

2.6.1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemsayarakatan yang ada. Umumnya mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang bertasipasi daripada mereka yang dai kelompok usia lainnya.

2.6.2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalm kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan wanita yang terutama adalahmengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan yang semakin baik.

2.6.3. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk bertasipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesehjahteraan seluruh masyarakat.

2.6.4. Pendapatan

Pendapatan dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan. Karena umumnya pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan didapat. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencakupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk bertasipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarkat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian, sehingga fokusnya lebih kepada pendapatan atau penghasilan dari masyarakat, bukan dari jenis pekerjaan.

2.7. Kebijakan Pariwisata

2.7.1 Kebijakan Pariwisata Nasional

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata

Tabel II.1
Undang-undang RI No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

No.	Ketentuan-ketentuan Mengenai Cagar Budaya
1.	Cagar budaya merupakan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2	Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan; d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
3	Bangunan Cagar Budaya dapat : a. Berunsur tunggal atau banyak; b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam
4	Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: a. Mengandung Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya; dan

	b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lampau
5	Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila : a. Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun d. Memperlihatkan bukti pendekatan lanskap budaya e. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapatan fosil.
6	Kawasan Cagar Budaya hanya dapat memiliki dan atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hokum adat.
7	Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat : a. Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota b. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi c. Langkah jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi d. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintsa wilayah kabupaten/kota, baikyang telah punah maupun yang masih hidupdi masyarakat e. Berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
8	Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat

	Kabupaten/kota apabila memenui syarat : a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota b. Mewakili masa gaya yang khas c. Tingkat keterancamannya tinggi d. Jenisnya sedikit e. Jumlahnya terbatas.

2.7.2 Kebijakan Pariwisata Kabupaten Muna

Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Muna TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUNA Bab V Alokasi Pemanfaatan Ruang (Bagian 1) pasal 17 butir b mencakup kawasan sekitar cagar budaya yang meliputi daratan bentuk dan kondisi fisik cagar budaya, Bab V Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya (Bagian 2) Pasal 20 butir e mencakup pariwisata dan Pasal Pasal 25 Kawasan Pariwisata tercantum pada butir e pasal 20.

2.8. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang sedang diselidiki. Menurut Sugiyono (2008) metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data-data sesuai engan sebenarnya kemudian data-data tesebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.